BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangsa atas aset perbankan syariah sangat rendah apabila dibandingkan dengan aset perbankan konvensional, yaitu bernilai 3.49%, sedangkan perbankan konvensional atau *commercial banks* memiliki lebih dari 70% dari total pangsa atas aset lembaga keuangan di Indonesia (Bank Indonesia, *Financial Stability Review* tahun 2015). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu komponen perbankan syariah di Indonesia.BPRS termasuk dalam kelompok lembaga keuangan syariah yang mampu memberikan layanan intermediasi keuangan kepada berbagai lapisan masyarakat, salah satunya untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan bagi kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Namun, aset BPRS sangat kecil apabila dibandingkan dengan total aset perbankan syariah di Indonesia. Data pada Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia bulan Juni 2016 memperlihatkan total aset gabungan BPRS di seluruh Indonesia bernilai 8 triliun rupiah atau hanya sebesar 4% dari keseluruhan total aset perbankan syariah yang mencapai 235 triliun rupiah. Kondisi tersebut membuat kontribusi BPRS sangat kecil pada tataran perbankan nasional.BPRS di Indonesia menghadapi pasar persaingan yang cukup sulit, yaitu berada di antara pasar persaingan lembaga keuangan mikro dan pasar persaingan bank-bank umum konvensional maupun syariah.

Perkembangan dan pertumbuhan BPRS di Indonesia perlu didukung, mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian pada sektor riil melalui pembiayaan unit UMKM.Data Badan Pusat Statistik tahun 2012 menyatakan bahwa jumlah UMKM terus meningkat sejak krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1998. UMKM di Indonesia mencapai 56,534,592 unit atau senilai 99.99% dari total pengusaha di Indonesia dan pengusaha besar hanya sebanyak 4,968 unit atau senilai 0.01%. UMKM merupakan sektor ekonomi yang mampu menyerap tanaga kerja sebanyak 107,000,000 orang sampai tahun 2012. Di sisi lain, akses pembiayaan sektor UMKM hanya mencapai 30% sehingga BPRS harus dipastikan menjadi *executor* utama untuk mengambil peluang tersebut.

Pertumbuhan dan perkembangan BPRS berkaitan dengan kinerja yang dapat dicapainya.Zeller dan Meyer (2002) dalam Fauzi (2014: 1) menyatakan bahwa indikator kinerja lembaga keuangan mikro dan kecil seperti BPRS meliputi tiga hal, yaitu kesinambungan keuangan, jangkauan, dan dampak. Kesinambungan keuangan bisa diukur dengan cara melihat perkembangan penggunaan biaya dan nilai keuntungan yang dihasilkan. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dikumpulkan dan luas wilayah kerja merupakan ukuran indikator jangkauan.Indikator dampak bisa dilihat berdasarkan peran BPRS sebagai sumber pembiayaan UMKM di wilayah kerjanya.Kinerja yang baik dapat

dicapai BPRS apabila mensinergikan ketiga konsep tersebut sebagai suatu pencapaian operasional.

Perkembangan pembiayaan dan DPK BPRS di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.Pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan BPRS di Indonesia mencapai rata-rata 34.55% setiap tahun dari tahun 2011 hingga 2015. Rata-rata pertumbuhan DPK yang berhasil dikumpulkan oleh keseluruhan BPRS di Indonesia bernilai 36.8% setiap tahun dari tahun 2011 hingga 2015 (Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah Th. 2016). Pertumbuhan yang positif tersebut membuktikan bahwa kontribusi BPRS terhadap perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia cukup signifikan.

Pencapaian kinerja efisiensi BPRS di Indonesia perlu diketahui dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi BPRS terhadap sektor UMKM yang terus bertumbuh dan berkembang sampai sekarang.Pencapaian kinerja efisiensi BPRS di Indonesia dapat diketahui dengan mengukur dan membandingkan nilai efisiensi antar BPRS.Berdasarkan perbandingan tersebut, gambaran tentang jumlah BPRS yang sudah melaksanakan kegiatan operasional dengan efisien maupun belum efisien dapat diketahui.

Tabel 1.1 Jumlah BPRS di Indonesia Periode 2013 – 2015

No.	**Kawasan**	**Periode**		
		2013	**2014**	**2015**
1	Pulau Jawa	105	105	110
2	Pulau Sumatera	41	41	41

3	Pulau Sulawesi	8	8	8
4	Bali dan Nusa Tenggara	4	4	4
5	Pulau Kalimantan	3	3	3
6	Papua dan Maluku	2	2	1
	Jumlah	**163**	**163**	**167**

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah 2016

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 jumlah BPRS hingga tahun 2015mencapai 167 unit.Namun, penyebaran atau distribusi BPRS di Indonesia tidak merata pada setiap kawasan. Pulau Jawa selalu memiliki jumlah BPRS yang paling banyak pada setiap periode apabila dibandingkan dengan kawasan lain. Jumlah BPRS di Pulau Jawa meningkat pada tahun 2015 dengan hadirnya 5 BPRS baru dalam industri. Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, kawasan Bali - Nusa Tenggara, dan Pulau Kalimantan memiliki pertumbuhan BPRS yang *stagnant* dari tahun 2014 sampai 2015. Maluku dan Papua yang secara geografis terletak di wilayah paling ujung timur Indonesia hanya memiliki satu BPRS sampai akhir tahun 2015.Kondisi sebaran BPRS yang tidak merata mengindikasikan kinerja yang berbeda pada setiap kawasan atau daerah. Keberadan UMKM, kebutuhan atas pembiayaan dan *accessibility intention* terhadap pembiayaan menjadi faktor-faktor yang mungkin menyebabkan perbedaan kinerja BPRS pada berbagai kawasan di Indonesia. Selain itu, potensi penghimpunan DPK dan perkembangan penyaluran pembiayaan berbeda pada masing-masing kawasan atau daerah operasional.

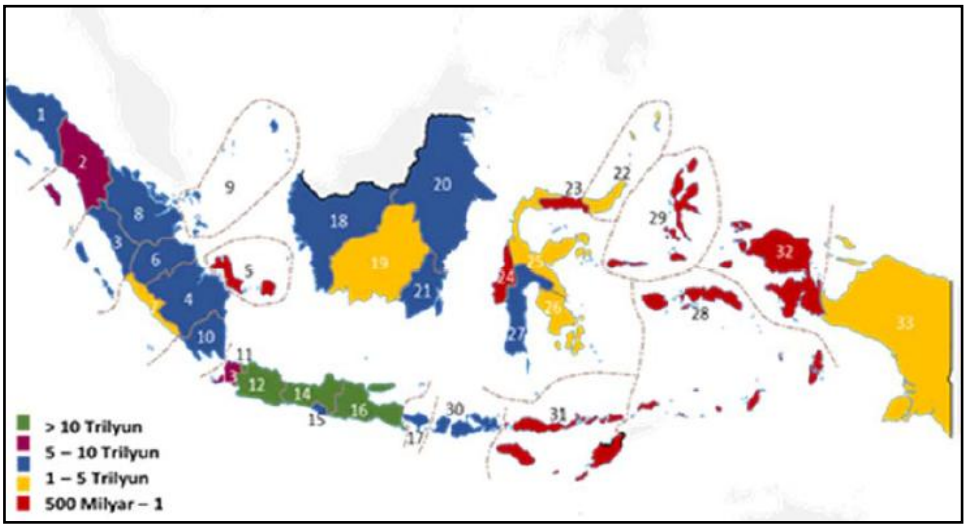

Sumber: Statisktik OJK (2014), *Karim Consulting Indonesia Analysis*, 2015

Gambar 1.1 Peta Penyebaran Pembiayaan Perbankan Syariah

Gambar 1.1 menginterpretasikan bahwa penyebaran pembiayaan di Indonesia tidak merata. Pembiayaan terbesar dengan nominal lebih dari 10 triliun rupiah berada di kawasan Jawa, yaitu DKI Jakarta dengan total pembiayaan mencapai 40.98% dari keseluruhan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Lima provinsi lainnya di Pulau Jawa, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur memiliki rata-rata pembiayaan pada angka 5 sampai 10 triliun rupiah. Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan memiliki sebaran pembiayaan pada angka yang sama, yaitu 1 sampai 5 triliun rupiah. Sebaran pembiayaan di Pulau Sulawesi bervariasi pada angka 500 miliar sampai dengan 1 triliun rupiah.Kawasan Bali – Nusa Tenggara memiliki sebaran pembiayaan kurang dari 5 miliar rupiah. Pembiayaan yang dibutuhkan UMKM memiliki *share* terhadap total pembiayaan yang berbeda di masing-masing daerah atau kawasan. UMKM di Pulau Jawa memiliki kebutuhan paling

besar atau mencapai 53% dari total pembiayaan yang dibutuhkan (Bank Indonesia, Data Net Ekspansi Kredit Desember 2013). Perbedaan tersebut membentuk asumsi bahwa daerah operasional yang berdasarkan*geographical location* memiliki pengaruh terhadap kinerja BPRS dalam mengelola input dan menghasilkan output berupa pembiayaan untuk UMKM dan unit usaha lainnya.

Kinerja BPRS membutuhkan suatu pengukuran untuk melihat pengelolaan dan mengarahkan operasional BPRS menuju taraf efisiensi tertentu.Nilai efisiensi BPRS bisa beragam karena sifat-sifat geografis yang berbeda pada masing-masing daerah operasional. Penelitian yang dilakukan Kifle Tesfamariam, Hailemichael Tesfay, dan Aregawi Tesfay pada tahun 2013 menemukan fakta bahwa lokasi geografis mempengaruhi rata-rata efisiensi *rural banks* di Trigray Region, Ethiopia. Rata-rata efisiensi tertinggi dimiliki Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beroperasi di zona selatan dan zona barat dari Tigray Region.

Efisiensi dapat diukur dengan pendekatan non-parametrik dan parametrik.Menurut Berger dan Mester (1997) dalam Fauzi (2014: 4) pengukuran efisiensi yang melibatkan tingkat input dan output umumnya memiliki nilai yang beragam serta bersifat *stochastic*. Penggunaan metode parametrik yaitu *stochastic frontier analysis* (SFA) diasumsikan sebagai salah satu pendekatan yang tepat untuk mengukur tingkat efisiensi BPRS di Indonesia. Metode SFA menggunakan batasan fungsi keuntungan (*frontier profit*) dalam membandingkan profit aktual dan maksimum yang

dapat dicapai suatu BPRS dalam kegiatan operasionalnya. Pengukuran efisiensi membandingkan pengelolaan input dari masing-masing BPRS untuk memaksimalkan outputnya, baik BPRS yang berada di daerah yang sama maupun BPRS yang berada di kelompok daerah yang berbeda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan kinerja efisiensi BPRS di Indonesia?
2. Adakah hubungan antara faktor geografis dengan efisiensi BPRS di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai peneliti yaitu:

1. Menganalisis perbandingan kinerja efisiensi BPRS di Indonesia
2. Menganalisis hubungan antara faktor geografis dengan efisiensi BPRS di Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat secara teoritis:
    a. Sebagai pengetahuan dalam studi ekonomi keuangan khususnya perbankan
    b. Sebagai cara membandingkan tingkat efisiensi BPRS di Indonesia dan berkaitan dengan faktor eksternal geografis

2. Manfaat secara praktis:
   a. Sebagai referensi dalam mengambil kebijakan atau keputusan manajemen dalam kaitannya dengan tingkat efisiensi kinerja BPRS yang diteliti selama tahun 2013-2015
   b. Sebagai dasar untuk membantu pemerintah menciptakan tren positif pertumbuhan BPRS dan ekonomi keuangan syariah dalam perkembangannya di Indonesia
   c. Sebagai informasi tambahan dalam memilih suatu BPRS dan diharapkan sebagai acuan penelitian lainnya

E. Sistematika Pembahasan

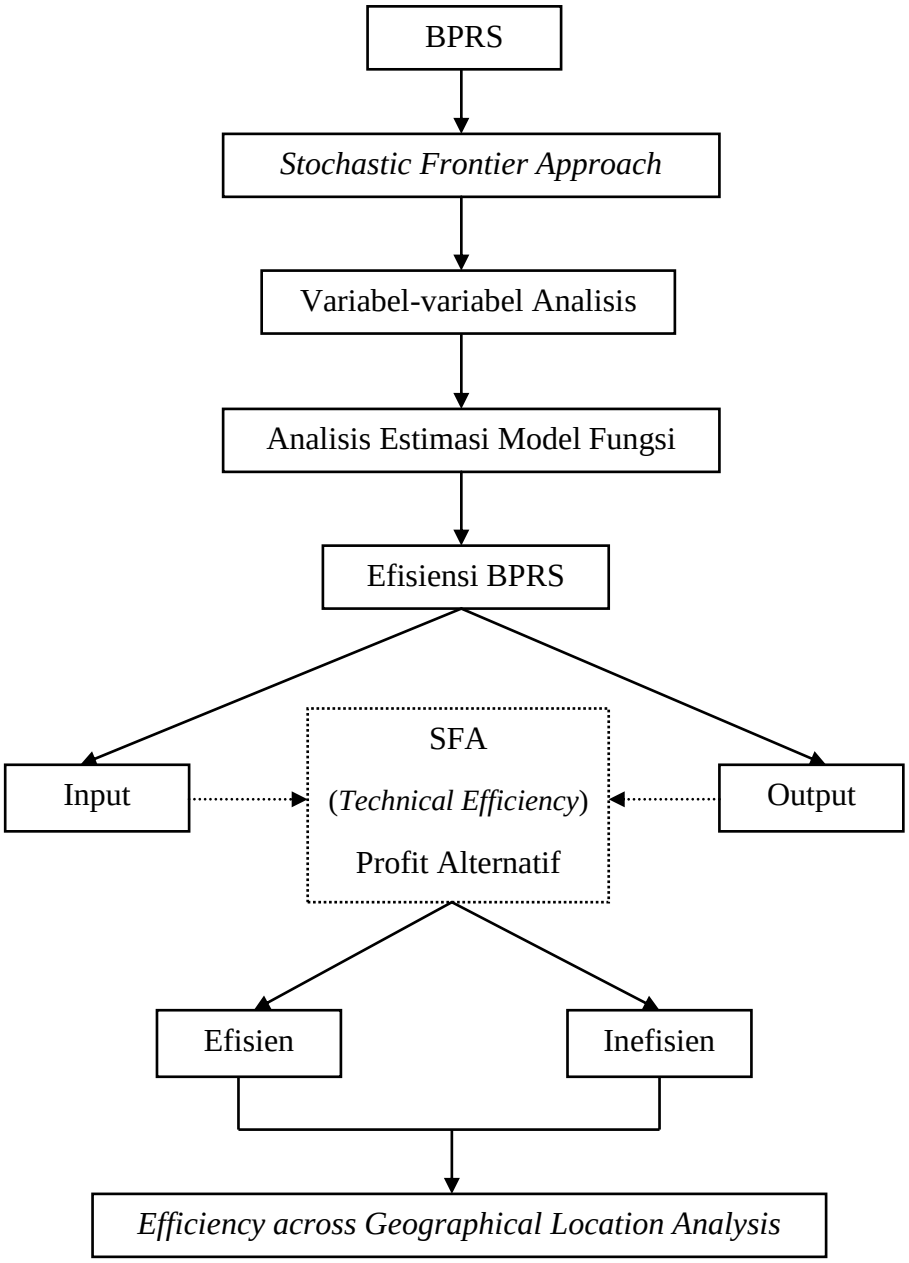

Gambar 1.2 Bagan Sistematika Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi fungsi profit, yaitu keuntungan bersih (π), variabel input dan variabel output. Variabel input meliputi harga dana (P_1) dan *price of labour* (P_2). Variabel ouput meliputi piutang jual beli (Q_1) dan pembiayaan bagi hasil (Q_2).Alur pemikiran secara konseptual dapat dilihat pada Gambar 1.2.